

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa dituntaskan bahkan kini semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia (SINAGA, 2021).

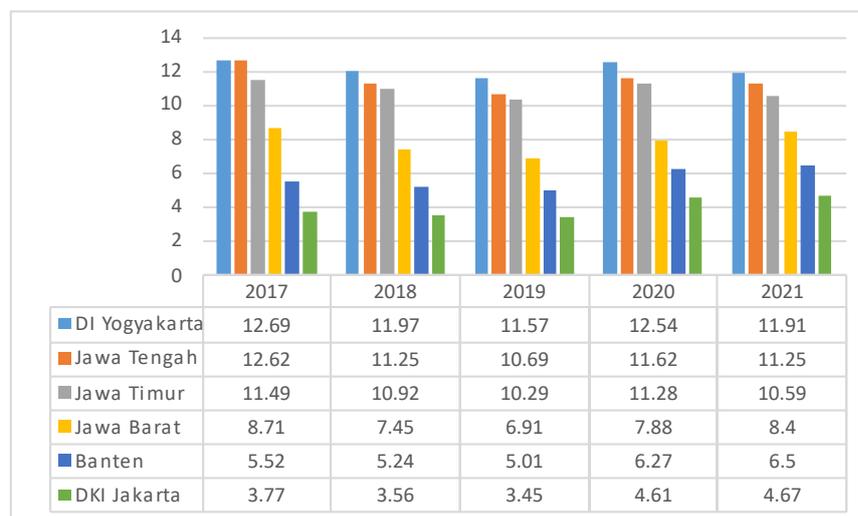
Kemiskinan selalu menjadi kendala yang sangat sering muncul sepanjang sejarah bahkan tak pernah absen dalam setiap tahunnya, sehingga berbagai upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan harusnya diimplementasikan secara baik dan benar sebagaimana dijelaskan bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Namun Sejauh ini Pemerintah belum memiliki cara dan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, strategi yang berbeda harus dibuat untuk memperkuat peran dan status perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional serta kebijakan yang dipilih harus memihak dan mensejahterakan masyarakat melalui program pemerintah yang tepat sasaran seperti optimalisasi dana ZIS (Zakat, Infak, Sadaqah) dan bantuan sosial, selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus selalu didasarkan pada penentuan

kemiskinan yang benar dan pemahaman yang jelas tentang akar permasalahannya. Mukhamad Ikhlas Darmawan dkk (2022).

Usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam menurunkan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, pemerintah Provinsi-provinsi lain termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Permasalahan kemiskinan ini juga melanda seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satunya seharusnya kebijakan yang dipilih harus memihak dan mensejahterakan masyarakat.

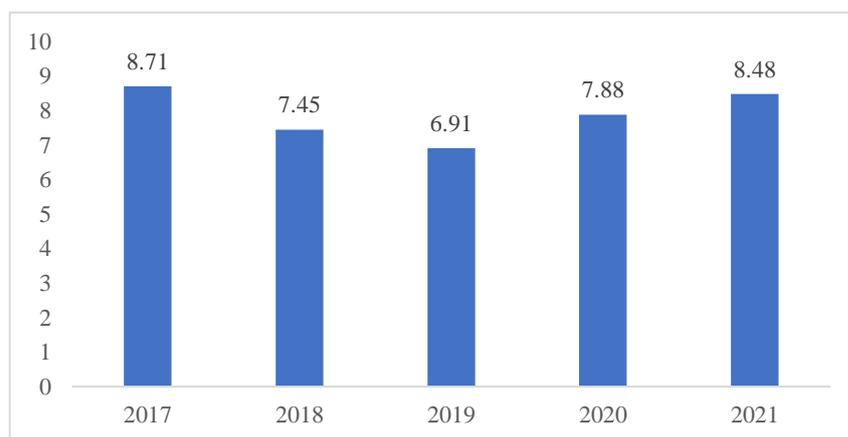
Berdasarkan hal tersebut berikut perbandingan peresentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2017-2021.



Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2017-2021(%)
(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 Jawa Barat berada pada urutan ke 4 terendah setelah Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat berjumlah 48,64 juta jiwa dengan luas wilayah

provinsi 37.040 km persegi, maka setiap 1 km persegi di tanah Pasundan rata-rata dihuni 1.313 jiwa penduduk. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak penduduk yang tinggal di Jawa Barat, kebutuhan akan tempat tinggal, pekerjaan yang layak serta fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan juga meningkat sehingga tingkat kemiskinan juga dapat meningkat, permasalahan kesejahteraan ini juga berhubungan dengan permasalahan kesenjangan sosial masyarakat dan pemberian bantuan melalui kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya berikut Peresentase tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat:



Gambar 1.2

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021(%)

(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat kemiskinan Jawa Barat tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,52% ini karena covid-19 yang melanda Provinsi Jawa Barat dampak ini menjadi masalah karena pendapatan para pekerja yang menurun sehingga tingkat kesejahteraan rumah tangga mengalami penurunan, hal ini juga sangat mungkin dikarenakan tingginya tingkat pengangguran terbuka, sehingga membuat tingkat kemiskinan meningkat.

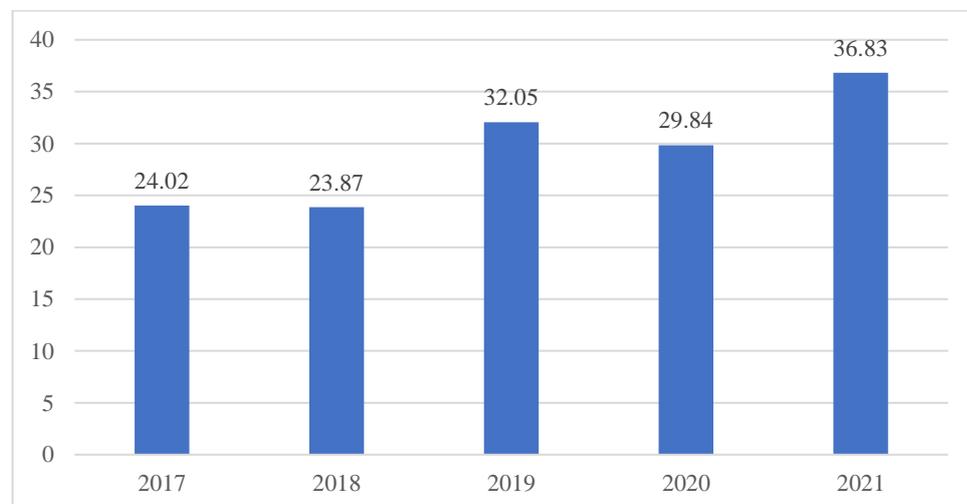
Faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan Menurut Nafi, B. (2021) Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) dimana zakat sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Pertumbuhan zakat merupakan salah satu paradigma dalam kerangka Islam. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dana zakat. Demografi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan kondisi yang memberikan peluang besar untuk mengembangkan dan mengelola dana zakat tersebut.

Apalagi Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam karena membayar zakat merupakan wujud pelaksanaan ibadah guna menghindarkan diri dari kekufuran sekaligus untuk meminimalisir munculnya sifat iri dan dengki ketika si miskin melihat kelompok masyarakat kaya. Sejumlah penelitian juga telah menjelaskan adanya korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu mendeskripsikan Islam mensyariatkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial (keadilan sosial). Karena zakat adalah dana yang dipungut dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin. Jadi tujuan zakat sangat jelas untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita. Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Hasibuan, H. (2019).

Berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan peranan pendayagunaan dana zakat yang dikelola

Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Pendayagunaan dana ZIS mempunyai dua sifat, yaitu bersifat santunan dan bersifat bantuan. Bersifat santunan artinya pendistribusian dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan konsumtif. Sedangkan bersifat bantuan berarti pendistribusian dana tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya umat dengan kegiatan produktif, harapannya dana yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dapat memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan ketidak pemilikan sumber daya modal yang memadai. Amymie, F. (2017).

Berikut pendayagunaan dana ZIS BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2021:



Gambar 1.3

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

(Sumber: Badan Pusat Statistik & BAZNAS data diolah tahun 2023)

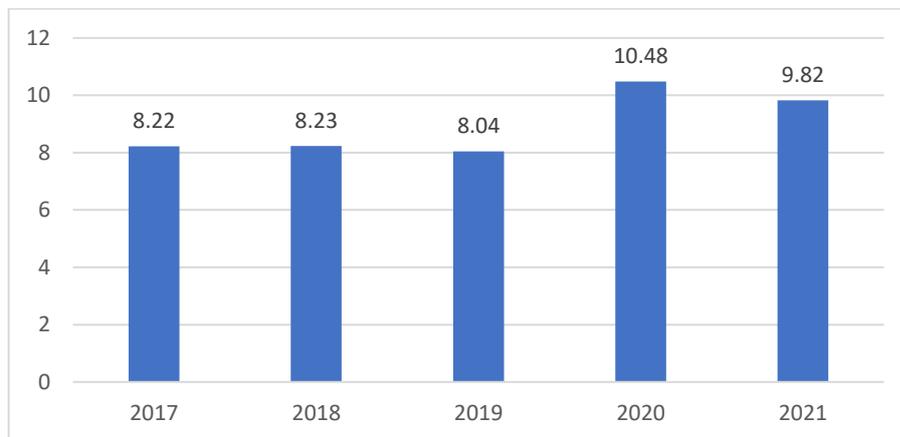
Berdasarkan gambar 1.2 Dana Zakat, Infaq dan shadaqah tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, paling tinggi pada tahun 2017 sebesar Rp8,71 miliar rupiah dan paling rendah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.6,91 miliar rupiah.

Menurut Yacoub, Y. (2013). ada interaksi antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan dimana untuk Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Meningkatnya angka pengangguran telah menimbulkan masalah besar, terutama di Negara Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat. Pengangguran yang berlangsung cukup lama dan berkelanjutan akan menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat, karena tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rasio ketergantungan antara pekerja dan pengangguran tinggi.

Penulis menggunakan Indikator pengangguran yaitu dengan tingkat pengangguran terbuka, dimana pengangguran terbuka memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam pengangguran.

Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat (persen) Tahun 2017-2021:



Gambar 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021(%)

(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023)

Menyimpulkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 8,22% kemudian angkanya mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2019 , namun pada tahun 2020 sebesar 10,46 tingkat pengangguran terbuka naik sangat tinggi hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga melumpuhkan beberapa sektor termasuk ekonomi hingga banyak sekali angkatan kerja yang tidak terserap bahkan banyak pula para pekerja yang kehilangan pekerjaannya, namun pada tahun 2021 9,82% mengalami penurunan karena menunjukkan lapangan kerja di Jawa Barat membaik, walaupun belum sepenuhnya pulih *(Kepala BPS Jawa Barat Dyah Anugrah)*

Pendidikan telah menjadi bagian penting dari suatu negara dan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

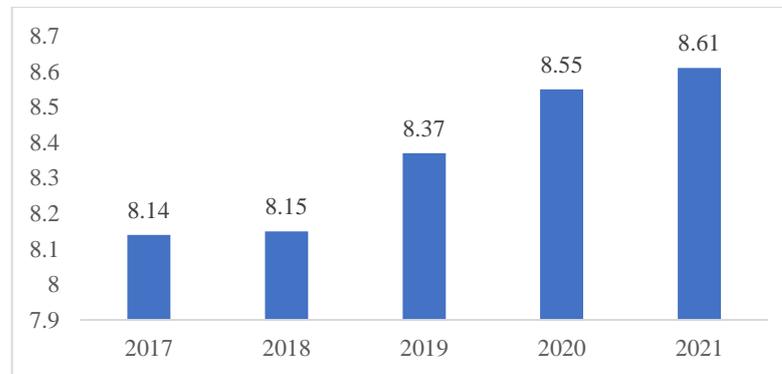
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Rafil, S. (2019) Pendidikan adalah upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sosial ekonomi, kesehatan dan gizi yang baik tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Pemerintah melakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar masyarakat Indonesia menjadi SDM yang berkualitas, selain itu juga agar dapat mengurangi kemiskinan dan yang ada dengan banyaknya orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan untuk merubah taraf kehidupannya.

Selain tingkat pengangguran terbuka, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Subroto, G. (2014). pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan turut serta memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan, melalui produktivitasnya dapat meningkatkan pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penulis memilih rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan karena rata-rata lama sekolah karena mengutamakan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini

sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. (*Sistem Informasi Rujukan Statistik - View Indikator, n.d.*)



Gambar 1.5
Pendidikan (Rata- Rata Lama Sekolah) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 (Tahun)

(*Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023*)

Menjelaskan pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Barat pada tahun 2016-2021 mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya, angka terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,95 tahun kemudian pada tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu sebesar 8,61 tahun yang ditempuh penduduk dalam menjalankan pendidikan terus meningkat. Hal ini karena banyak orang tua yang perlahan mulai menyadari bahwa pendidikan itu penting.

Indikator selanjutnya adalah belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial memiliki interaksi dengan tingkat kemiskinan, Menurut Lidysari, W (2011) belanja bantuan sosial yang disalurkan secara tepat dan sesuai sasaran serta mengalami peningkatan setiap tahunnya maka diharapkan akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Semakin besar belanja bantuan sosial maka akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

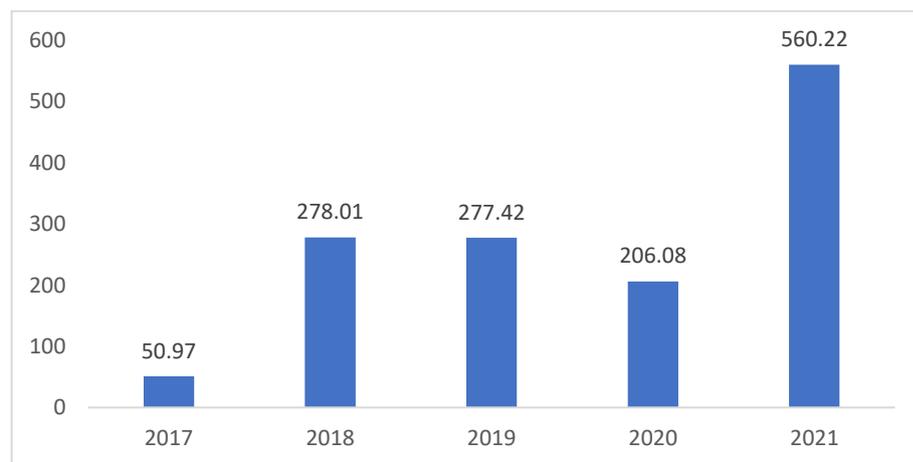
Belanja bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Resiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Resiko sosial ini merupakan peristiwa atau insiden yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang ditimbulkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas asal daya. Kemungkinan kejadian atau peristiwa yang menghasilkan tempat tinggal rumah tangga (masyarakat) dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu famili, grup atau warga sebagai akibat dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam serta bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk serta dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Bila ditinjau asal kementerian lembaga yang melakukan belanja- belanja untuk bantuan sosial maka kita mampu mengimbangi belanja kapital yang besar ini menggunakan perbaikan di bidang penurunan

kemiskinan dan kesenjangan. Ini adalah sebuah ilustrasi pada realisasi pengeluaran pemerintah berdasarkan belanja bantuan sosial.

Terutama sejak 2020 dan 2021 ketika Indonesia diterpa pandemi Covid-19, misalnya, dia mengklaim pemerintah berhasil melakukan program perlindungan sosial (perlinsos). Selama 2020 banyak sekali program perlinsos yang dilakukan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, subsidi listrik, BLT Desa, hingga Kartu Prakerja. Sebagian besar dari program perlindungan sosial juga dilanjutkan pada 2021. Berikut anggaran belanja bantuan sosial.



Gambar 1.6
Belanja Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 (Ribuan Rupiah)
(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023)

Menjelaskan belanja bantuan sosial pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi naik turun, pada tahun 2017 merupakan paling rendah yaitu sebesar Rp.50.973.939,00 kemudian yang paling tinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 560.211.750,00. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 banyak bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada uraian yang sudah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian perihal **“Pengaruh Dana ZIS, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial dana penyaluran zakat, infak dan shadaqah, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan bantuan sosial secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2021.
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama zakat, infak dan shadaqah, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi tersebut, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh dana ZIS, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, dan bantuan sosial secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2021.
2. Pengaruh dana ZIS, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan bantuan sosial secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tidak hanya teori yang didapat selama perkuliahan namun juga dengan prakteknya langsung dilapangan, sehingga peneliti dapat menemukan perbandingan antara teori dan kenyataan langsung yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagi pemerintah dalam hal perumusan ataupun pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat juga menjadi pembanding khususnya dalam mempelajari permasalahan kemiskinan di Indone

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan melalui situs resmi BPS Provinsi Jawa Barat, karena untuk mengetahui seperti apa dan sejauh mana pengaruh angka harapan hidup, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan dan juga agar mendapatkan data untuk menunjang usulan penelitian ini.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini yaitu sejak bulan november 2022 hingga bulan januari, yang dimulai dengan pengajuan judul kepada pihak program studi ekonomi pembangunan dan diakhiri dengan ujian seminar proposal skripsi. Berikut ini tahapan pelaksanaan penelitian secara detail pada tabel 1.1

